

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kandidasi dalam penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jambi tahun 2020, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional tidak memiliki kewenangan menentukan kandidat untuk dicalonkan, melainkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang menentukannya, akhirnya hubungan kandidat-kandidat hanya sebatas lokal. Kemudian dalam penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional bersifat tertutup dimana hanya diketahui oleh segelintir elit dan tidak jarang pertukaran lobi antara kandidat dan petinggi partai ditingkat pusat masih sering terjadi, pada saat itu juga kontrak politik antara calon dan partai biasa terjadi.
2. Penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional sangat pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan sifat partai yang pragmatis dalam hal pengusungan pasangan calon, karena melihat popularitas, modal ekonomi dan masif pertukaran lobi antara kandidat dengan petinggi partai ditingkat pusat. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya sumber-sumber pertukaran materil

dimana keputusan penentuan kandidat tidak dilatarbelakangi oleh platform ideologi partai politik, sehingga banyak kader partai maupun tokoh dan dianggap mampu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

4.1 Saran

1. Perlu adanya keterbukaan pada proses kandidasi dilakukan oleh Partai Amanat Nasional sehingga pada proses penetapan kandidat, adanya transparansi proses-proses dilalui oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Serta perlunya keterlibatan elit partai politik yang lebih banyak lagi dalam proses penyeleksian kandidat hingga penetapan kandidat. Kemudian partai dalam kandidasi harus mempertimbangkan rekomendasi dari partai ditingkat lokal.
2. Partai politik harus berorientasi dalam organisasi berbadan publik artinya tidak berbadan privat. Selanjutnya memperhatikan secara utuh garis-garis perjuangan partai baik ideologi maupun platform yang telah diputuskan oleh Partai Amanat Nasional. Perlu adanya kesiapan yang matang yang harus dilakukan oleh partai kepada kader internal partai untuk ikut serta terlibat pada proses kandidasi dalam suatu pemilihan baik itu eksekutif ataupun legislatif. Artinya keputusan dalam penentuan calon haruslah berjenjang dimulai dari potensi-potensi kader. apabila dalam proses kandidasi terlalu banyak bakal calon dari eksternal partai maka dapat dikatakan partai politik gagal dalam kaderisasi dan melaksanakan pendidikan politik terhadap kadernya sendiri.